

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Aceh yang dahulu pernah menjadi sebuah negara tangguh di dunia kini menjadi sebuah provinsi dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berkedudukan di ujung barat pulau Sumatra yang di batasi oleh Teluk benggala sebelah Utara, samudra Hindia di sebelah barat, Selat malaka di sebelah Timur dan Sumatra Utara di sebelah Tenggara dan Selatan. (Adan 2006: 3)

Tanah Aceh terletak di jalur lalu lintas dunia yang ramai sejak dahulu, sangat terbuka untuk menerima kedatangan berbagai unsur darah dari seluruh jagad, sehingga karenanya orang-orang Aceh, terutama pesisir, adalah campuran dari berbagai unsur. (Hasjmy 1995: 54).

Secara historis, berbagai peristiwa konflik politik internal Aceh sebelumnya, dimulai peristiwa perang Cumbok tahun 1945-1946 yang merupakan konflik internal antara ulama dan Uleebalang Aceh. Perang Cumbok adalah konflik sosial yang berpusat di Pidie, antara kelompok uleebalang (bangsawan). Perang ini pada dasarnya adalah pergolakan untuk meruntuhkan feodalisme di Pidie yang dipicu perbedaan pandangan dalam menyikapi kemerdekaan RI di Aceh pasca proklamasi RI, dimana pihak uleebalang menghendaki agar Belanda kembali ke Aceh, sementara PUSA menyetujui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Peristiwa Cumbok sebenarnya hanyalah puncak gunung es dari konflik laten antara uleebalang dan ulama yang sudah terjadi sejak ketika Belanda masih menguasai Aceh, dimana Belanda mendapatkan banyak dukungan dari kaum

bangsawan, sementara para bangsawan menikmati berbagai keistimewaan dibawah perlindungan Belanda. Privilege yang diperoleh kaum uleebalang, diantaranya adalah posisi-posisi kekuasaan di dalam struktur kekuasaan Belanda di kawasan Aceh Lheu Sagoe (kesultanan Aceh). Sementara itu, dilain pihak para ulama sangat menentang Belanda dan dengan sendirinya menyimpan ketidaksenangan terhadap kelompok uleebalang yang dianggap mempertahankan “status quo” sebagai pengkhianat orang Aceh. (Santoso 2014: 240-241)

Meskipun ada beberapa uleebalang yang tetap pro kemerdekaan dan mendukung ulama, tapi perang Cumbok tetap merepresentasikan konflik ulama versus bangsawan di Aceh. Dampak perang ini sangat mengerikan, banyak kaum Teuku melarikan diri keluar Aceh atau di wilayah Aceh yang bebas konflik, serta meninggalkan luka mendalam di jiwa orang Aceh, terutama di kawasan pesisir Timur dan Utara Aceh hingga kini. Ada kecenderungan orang Aceh menghindari diskusi tentang peristiwa kelam ini dalam pembicaraan sehari-hari, karena takut menyinggung orang-orang yang notabene adalah bagian dari komunitas sehari-hari. Perang Cumbok sendiri berakhir Januari 1946, dan pimpinannya, Teuku Daud Cumbok, dihukum mati. (Santoso 2014: 241).

Kaum Ulama merupakan suatu bagian yang amat berpengaruh dalam Masyarakat Islam. Mereka mempunyai kedudukan yang tinggi berkat pengetahuan keagamaan mereka. (Kartodirdjo 1981: 129)

Peneliti sejarah asal Selandia Baru, Anthony Reid, mengatakan, sejak uleebalang tersingkir akibat Revolusi sosial di Aceh, posisi ulama kian kuat di bawah Beureueh. Aceh, tulis Reid, menjadi daerah islam yang unik, sekaligus

“salah satu contoh Revolusi sosial yang berhasil”. Cerita sukses itu membuat pemerintah pusat, selama aksi militer belanda pertama pada 1947, mengangkat Beureuh sebagai gubernur militer. “ia satu-satunya orang tanpa pendidikan Belanda atau Jepang yang menerima pengangkatan begitu tinggi selama Revolusi,” tutur Reid dalam bukunya , (TEMPO 2001: 48)

Menurut sejarah, aceh telah memberi untuk republik. Bahkan awal pemberian aceh, yakni kesediaan Aceh sebagai daerah modal, merupakan pemberian yang sangat menentukan sebagai kelangsungan dan eksistensi indonesia. Jika kita bisa berandai-andai dengan sejarah, maka kita bisa mengatakan bila aceh menolak memberi pada saat itu, tentunya indonesia hanya ada seumur jagung lalu punah. Pemberian yang berwujud politis ini, tentunya, memiliki nilai yang tiada terhitung bila indonesia menghargai aceh. Belum lagi berbagai bentuk pemberian aceh lainnya yang bersifat material, seperti pesawat yang bukan saja sangat menentukan keberadaan RI, tetapi juga menjadi modal utama Angkatan Udara RI. (Ishak 2008: 40)

“wallahi, Billahi, kepada Daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syari’at islam. Dan Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syari’at islam di dalam daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga?” Demikian sepenggal janji yang diucapkan presiden Sukarno pada Daud Beureuh ketika menyambangi Aceh tanggal 17 juni 1948. Tetapi, janji sukarno tak ubahnya pepesan kosong. Bukanya janji yang terpenuhi, Aceh justru dijadikan bagian dari Provinsi Sumatra Utara. Daud Beureuh yang terlanjur

meradang kemudian memutuskan untuk melawan sebagai reaksi atas kekecewaannya terhadap Republik. (Ruslan 2008: 78)

Pemberontakan aceh berawal dari penolakan Daud Beureuh atas rencana jakarta menggabungkan Aceh dengan Sumatra utara ke dalam satu Provinsi. Karena tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Soekarno, tahun 1953 ia memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan S.M. Kartosoewirjo . (Aning 2007: 64)

Atas reaksi serius ini, pemerintah pusat kemudian meralat keputusan tidak populisnya itu dengan mengirim satu misi khusus yang dipimpin wakil perdana menteri untuk meredakan perlawanan “sakit hati” rakyat aceh tersebut. Alhasil, Jakarta kemudian memberikan kembali status provinsi Aceh dengan penambahan otonomi kepada rakyat Aceh. Hal ini dituangkan melalui Undang-Undang no.24 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi sumatra utara. Undang-undang ini kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya keputusan perdana menteri republik indonesia No.1/Missi/tahun 1959 Tentang pemberian keistimewaan kepada provinsi Aceh dalam bidang keagamaan, peradatan, dan pendidikan. Sayangnya, hal yang dikatakan istimewa tersebut tidak pernah terwujud karena lahirnya undang-undang No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. (Arifin 2011: 11-12)

Konflik sosial pada hakikatnya merupakan suatu gejala sosial yang melekat di dalam setiap kehidupan masyarakat, dan oleh karenanya melekat pula di dalam kehidupan setiap bangsa. Akan tetapi, konflik-konflik sosial di dalam

berbagai masyarakat senantiasa memiliki derajat dan polanya masing-masing.
(Nasikun 1998: 5)

Perjuangan Teuku Daud Beureueh di Aceh dan Keberadaan peran Teuku Ilyas Leube dalam Darul Islam di Kota Takengon Kabupaten Aceh tengah menjadi sebuah fenomena menarik untuk di kaji. Minimnya penulisan sejarah tentang Teuku Ilyas Leube dalam peranannya dalam Darul Islam merupakan alasan lain mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu peneliti mencoba menelusuri keterkaitan Teuku Ilyas Leube dalam DI/TII dengan judul **“PERANAN TEUKU ILYAS LEUBE TERHADAP DI/TII DI TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH (1953-1962)”**



1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Lahirnya Organisasi DI/TII di Aceh tahun 1953-1962.
2. Peran Teuku Ilyas Leube dalam DI/TII Aceh tahun 1953-1962 .
3. Persepsi masyarakat sekarang tentang perjuangan Teuku Ilyas Leube dalam Organisasi DI/TII di Aceh Tengah.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang lahir nya Organisasi DI/TII di Aceh (1953 – 1962) ?
2. Bagaimana peran Teuku Ilyas Leube dalam DI/TII Aceh (1953 – 1962) ?
3. Bagaimana persepsi masyarakat sekarang tentang perjuangan Teuku Ilyas Leube dalam Organisasi DI/TII di Aceh Tengah ?

1.4. Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang lahir nya Organisasi DI/TII di Aceh (1953-1962).
2. Untuk mengetahui peran Teuku Ilyas Leube dalam DI/TII Aceh (1953-1962).

3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat sekarang tentang perjuangan Teuku Ilyas Leube dalam Organisasi DI/TII di Aceh Tengah.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai Teuku Ilyas Leube serta peranannya dalam DI/TII.
2. Untuk menambah pengetahuan atau informasi bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum tentang sejarah DI/TII Aceh.
3. Memperkaya informasi bagi masyarakat khususnya di, Takengon Aceh Tengah untuk mengetahui Sejarah Teuku Ilyas Leube.
4. Memperkaya informasi bagi akademisi UNIMED, khususnya jurusan Pendidikan Sejarah untuk dapat kiranya mengetahui dan memahami mengenai Sejarah DI/TII dan Teuku Ilyas Leube.
5. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama.
6. Menambah daftar bacaan kepustakaan ilmiah UNIMED khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah.